



**MUKOMUKO**

**SUMBER BERITA**

**SABTU, 13 AGUSTUS 2022**

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**BPK Sorot PAD Pemkab Mukomuko**

**MUKOMUKO** - Pemkab Mukomuko memang arus ektra dalam melihat potensi pendapatan asli daerah (PAD), agar meningkat realisasinya. Terukti dari hasil pendalaman yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mukomuko, mendapati sejumlah potensi PAD yang berpotensi bocor. Karena sumbu yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mukomuko, nyatanya dak disesuaikan dengan realisasi PAD yang sudah erjalan.

Apalagi dalam penetapan asumsi PAD ditahun nggaran berikutnya, disinyalir tidak melibatkan PD terkait. Mengingat sejumlah OPD saat diundang embahasan dengan Banggar, mengakui mampu enaikkan PAD dari asumsi yang telah dibuat TPAD. "Kita sudah tanya dengan beberapa OPD terkait. a apa tidak diajak rapat atau koordinasi dari TAPD engeuai penetapan asumsi PAD. Ternyata mereka engatakan tidak ada. Berarti TAPD asal-asalan saja enyusun asumsi PAD," kritik Ketua DPRD Muko- uko, M. Ali Saftaini, SE.

Dan ternyata, Badan Pemer- ssa Keuangan (BPK) pun telah enyorot dengan memberikan ejumlah catatan pada Pemkab ukomuko. Mengenai adanya otensi PAD yang tidak diterima aerah, dari tahun anggaran ebelumnya. Yang semestinya, atatan itu harus jadi evaluasi untuk tahun anggaran berjalan lan tahun anggaran berikutnya.

"Bukan malah sebaliknya, me- nyusun asumsi pendapatan dari sejumlah sektor itu, turun. Mis- alnya saja, ada catatan BPK, bahwa Pemkab berpotensi tidak menerima PAD dari satu sektor, ratusan juta. Nah sudah diberi catatan oleh BPK, dan sudah dita- ksir pula potensinya oleh BPK. Ini malah buat asumsinya di puluhan juta," sorot Ali.

Salah satu catatan BPK yang itu masuk dalam temuan dari hasil pemeriksaan, pajak restoran di tahun 2021. Bahwa pemasukan pajak restoran khusus dari belan- ja makan dan minum di Pemkab saja, mestinya bisa masuk ke kas daerah hingga Rp 474,07 juta. Namun angka yang diakui masuk ke kas daerah, dari sektor pajak restoran, hanya sebesar Rp 206,2 juta. Ditambah ada piutang tidak tertagih sebesar Rp 49,5 itta.

Maka dari jumlah itu, jika piu- tang turut dihitung PAD yang sudah diterima daerah. Pemkab Mukomuko masih kehilangan pendapatan, yang potensi pajak restoran yang tidak diterima dan

tidak diakui, sebesar Rp 227,2 juta.

"Nah dari sini saja sudah kelihat- an. Khusus dari belanja yang ada di lingkungan Pemkab Mu- komuko. Itu potensinya ditahun itu, analisis BPK, bisa sampai Rp 400 jutaan. Namun yang masuk hanya Rp 200 jutaan. Itu belum terhitung masuk pajak restoran yang murni belanjanya dari ma- syarakat. Sekarang untuk tahun 2023, malah hanya pasang asumsi PAD ari pajak restoran, Rp 49 juta," kesal Ali.

Sementara, untuk tahun ini saja, jika Pemkab jeli. Setidaknya dari belanja makan dan minum di lingkungan Pemkab saja. Potensi pajak restoran yang bisa masuk, bisa mencapai Rp 300 juta lebih. Karena anggaran untuk belanja makan dan minum, nilainya miliaran. Yang sesuai ketentuan peraturan daerah, nilai pajaknya 10 persen dari pembelanjaan.

"Nanti kita akan lihat, seperti apa realisasinya PAD dari sektor ini. Yang semestinya, realisasinya lebih tinggi. Karena sekitar Rp 300 jutaan itu, dari belanja makan dan minum di Pemkab saja. Bel- um termasuk belanja masyarakat yang setiap harinya berlangsung," tandas Ali.

Ketua Tim Anggaran Pemer- intah Daerah (TAPD) Kabu- paten Mukomuko, Drs. Yan- daryat Priendiana kepada RB menyatakan, asumsi yang disu- sun TAPD berdasarkan realisasi di tahun sebelumnya. Kemudian, dalam penyusunannya, pihaknya juga mempertimbangkan kondisi

pandemi Covid-19.

"Kita buat itu dalam kondisi pandemi Covid-19. Nah saat menyusun itu, kita kan tidak tahu apakah Covid-19 ini sudah bera- khir atau belum. Kita buat tinggi, tidak tahunya masih berlangsung sampai tahun depan Covid-19 ini," jelas Yandaryat.

Selain itu, pihaknya juga mem- pertimbangkan melambat bah- kan stagnannya pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya memper- hatikan pertumbuhan ekonomi nasional, tapi juga pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Dalam peganggaran, kita juga harus perhatikan faktor itu. Itu yang namanya psikologi ang- garan. Lebih baik kita pasang asumsi rendah, terpenting, bukan saja asumsi itu tercapai. Tapi realisasinya juga harus bisa lebih tinggi, lebih bagus. Daripada dibuat asumsi tinggi, yang terjadi malah hanya angka-angka saja tanpa realisasi," papar Yandaryat.

Selain itu, pihaknya berupaya, untuk terus memperbaiki sistem yang ada. Agar capaian pajak maupun retribusi, terealisasi maksimal. Dan itu juga dalam rangka menekan potensi kebo- coran PAD.

"Kita bersyukur, kalau me- mang kawan-kawan dari DPRD bisa menggali potensi dan mau memotivasi OPD. Dan itu me- mang tugas kita bersama. Karena kita ini bukan eksekutif saja, tapi juga legislatif. Jadi kita dorong sama-sama," demikian Yandary- at. (hue)